



# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**





## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun bejalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPSTP) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPSTP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan 2023 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPSTP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2023) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan

Lamongan, Desember 2023  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAOMONGAN



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19680114 198801 1 001



**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023.



### 1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dan Capaian



Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lamongan

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2023

3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2023

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut



**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN SAMPAI  
DENGAN TRIBULAN III TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Capaian tahun berjalan s/d Tribulan III pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan perkiraan capaian s/d Triwulan III tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.2.1



Tabel T-C.2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2023**

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023 s/d Triwulan III			Catatan/ Keterangan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Wajib										
2 18	Penanaman Modal Daerah										
2 18 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	83.80	100%	100%			82.90	98.67		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	3 Dokumen		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen		
2 18 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen		
2 18 01 2.02 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan		
2 18 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 Orang	27 org	27 Orang	27 Orang	100%	27 Orang	27 Orang		



**RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/triulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triulan/ semesteran SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	14 Laporan	6 Laporan	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi	2 Administrasi	2 Administrasi	2 Administrasi	100%	2 Administrasi	2 Administrasi	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	56 Stel	56 Stel	56 Stel	10%	1 Paket	1 Paket	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	9 orang	9 Orang	2 Orang	22%	20 Orang	0	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	100%	6 Administrasi	3 Administrasi	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Item	15 item	15 item	15 item	100%	22 Paket	11 Paket	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	4 Paket	



## RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kator	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor	4 Jenis	69 Jenis	69 Jenis	100%	4 Paket	2 Paket	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	15000 Lembar dan 5 Jenis	15000 Lembar dan 5 Jenis	100%	5 Paket	3 Paket	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Media	8 media	8 Media	100%	8 Dokumen	4 Dokumen	
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	15 Laporan	-	-	-	15 Laporan	8 Laporan	
2	18	01	2.06	09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	jumlah makanan dan minuman	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	-	-	
						Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah/ luar daerah	62 Perjalanan	62 kali	62 kali	100%	-	-	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	3 Laporan	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	1 Jenis	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	4 Set	4 Set	4 Set	100%	4 set	1 set	
2	18	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	1 Software	1 Software	100%	5 Unit	1 Unit	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	2 jenis	2 jenis	100%	3 Jenis	1 Jenis	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 rekening	4 rekening	100%	4 Laporan	2 Laporan	



**RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	100%	3 Laporan	2 Laporan
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi	-	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	-	-
						Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parker dan pemengudi	-	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	-	-
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	-	-	-	-	-	3 Laporan	2 Laporan
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	2 Jenis
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	-	-
						Jumlah motor jabatan yang dipelihara	-	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	-	-
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	-	-	-	-	-	15 Unit	6 Unit
2	18	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	2 Unit



**RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	33 Unit	16 Unit	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	
2	18	02			Program PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65.2%	64.2	64.2	100%	64.75%	2%	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	35 %	35 %	100%	4 Jenis	0 %	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	15 Kegiatan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	15 Kegiatan Usaha	0	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	35%	2%	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Updating Data	1 Updating Data	100%	1 Dokumen	0	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	80%	60%	60%	100%	70%	21%	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /	Jumlah Penyelenggaraan Promosi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	0 Kegiatan	



**RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	03	2.01	01	Kota	Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	1 Dokumentasi/Film	1 Dokumentasi/Film	1 Dokumentasi/Film	1 Dokumentasi/Film	1 Dokumentasi/Film	100%	-	-	-	-	
2	18	03	2.01	02	Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	-	-	-	-	
							Jumlah pemeliharaan balihoo	5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	100%	-	-	-	-	
							Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun	3.803 Izin	20.363 Izin	20.363 Izin	20.363 Izin	20.363 Izin	100%	3.747 Izin	15.790 Izin	-	-	
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian izin melalui system OSS dan sistem daerah	2.614 Izin	19.136 Izin	19.136 Izin	19.136 Izin	19.136 Izin	100%	2.614 Izin	15.790 Izin	-	-	
2	18	04	2.01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	8.911 Izin	8.911 Izin	8.911 Izin	8.911 Izin	8.911 Izin	100%	-	-	-	-	
							Jumlah pelayanan izin penunjang usaha yang diterbitkan	-	8.911 Izin	8.911 Izin	8.911 Izin	8.911 Izin	100%	-	-	-	-	
							Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	2.500 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	2.500 Pelaku Usaha	15.790 Pelaku Usaha	-	-	



**RENTJAWA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	20 Pelaku usaha	-	-	20 Pelaku usaha	376 Pelaku Usaha	
2	18	04	2.01	03	Sub Kegiatan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	720 Orang	6.729 izin	6.729 izin	6.729 izin	2.165 Orang	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya layanan konsultasi dan keterelolannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	67.53%	36%	36%	65.53%	0%	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9 Bulan	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	35 Perusahaan	35 Perusahaan	20 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	



**RENTJAN PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	75 Pelaku Usaha	70 Perusahaan	70 Perusahaan	100%	75 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	75 Kegiatan Usaha	300 Perusahaan	300 Perusahaan	100%	75 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2.5%	1.5%	1.5%	100%	-	-
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	63 Perijinan	63 Perijinan	63 Perijinan	100%	-	-
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penyediaan aplikasi data yang di update	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	100%	-	-



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Program Promosi Penanaman Modal
  - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	-	-	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	-3%	2.0%	2.5%	Renstra 2021-2026	
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	-	-	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	65%	2.0%	2.5%	Renstra 2021-2026	
3	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	-	-	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.70%	99.57	99.67	Renstra 2021-2026	
4	IKM/SKM	-	-	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	88.85	83.85	84.48	Renstra 2021-2026	
5	NILAI SAKIP DPMPPTSP	-	-	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	87.75	86.81	86.82	Renstra 2021-2026	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 3,55 – 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

### **2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman



## **RENA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



Tabel 2.3  
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			<b>NIHIL</b>		



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (satu), **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”**, dengan **Sasaran prioritas “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian”**. Target yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) 8.4 pada tahun 2024.
2. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator melalui usaha pada tahun 2024:  
(menuju 40)
  - a. Jumlah prosedur 5
  - b. Waktu (hari) 4
3. Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 1500 pada tahun 2024.
4. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%) 49.5 pada tahun 2024.
5. Nilai realisasi PMA dan PMDN industry pengelolaan (Rp Triliun) 782 pada tahun 2024.

Arah Kebijakan :

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun**

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politisi Visi dapat



dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, RPJPD periode ke 4 tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yakni:

## **TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) **Kejayaan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten yang *masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan*, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

**Misi 1.**

**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

**Misi 2.**

**Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

**Misi 3.**

**Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut:



Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

**Misi 4.**

**Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram, dengan penjelasan sebagai berikut:**

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial V-6 dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

**Misi 5.**

**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :**

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Misi 5 (lima) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan



sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

**Tujuan**

1. Meningkatkan Realisasi Investasi ( Misi 1 )  
Indikator :Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif ( Misi 5 )  
Indikator :Nilai IKM/SKM

**Sasaran**

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA ( Misi 1 )  
Indikator :
  - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN
  - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
  - Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan ( Misi 5 )  
Indikator :
  - SKM
  - Nilai SAKIP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tujuan Dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2023	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	11	12
Meningkatkan Efektifitas Investasi	Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	2.0%	2.0%



		2. Prosentase Peningkatan Realisasi investasi PMA	2.0%	2.0%
		3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99.57%	99.57%
Meningkan pelayanan publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	SKM	83.85	83.85
	Nilai SAKIP DPMPPTSP	Nilai SAKIP	86.81	86.81

### 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah terdiri dari 6 program dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.917.752.812,- ( Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub kegiatan :
  - Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub kegiatan :
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan peiaporan keuangan akhir tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulnan, Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :



- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program pengembangan iklim penanaman modal**
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota
- Sub kegiatan :



- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan :
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**
1. Kegiatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub kegiatan :
- Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha strategis secara elektronik
  - Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
  - Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



**VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (Satu) yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”, dan Misi ke 5 (Lima) yaitu “Menghandirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.







## RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	Jumlah pengadaan meubelar	4 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	14.500.000	14.500.000	0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor: komputer, notebook, printer	5 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	29.500.000	29.500.000	0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	1.105.918.000	1.105.918.000	0
2	18	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Jumlah rekening yg dibayar	4 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	307.482.000	307.482.000	0
2	18	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	16.000.000	16.000.000	0
2	18	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	Jumlah tenaga administrasi	3 Laporan	DPM PTSP	DPM PTSP	782.436.000	782.436.000	0
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	DPMPPTSP	DPMPPTSP	138.674.700	138.674.700	(247.325.300)
2	18	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	15 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	43.774.700	43.774.700	1.774.700
2	18	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	0
2	18	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	Jumlah peralatan dipelihara	33 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	75.000.000	(50.000.000)
18	18	01	2.09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	Jumlah gedung yg dipelihara	2 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	250.000.000	50.900.000	(199.100.000)



# RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	02	02	02	Program Pengembangan Ilmu Penanaman Modal	Prosentase peningkatan minat investor	64,75%	Prosentase peningkatan minat investor	64,75%	DPM PTSP	DPM PTSP	100.500.000	100.500.000	0
2	18	02	2,01	02	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Jenis Kemudahan Berusaha dan Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	4 Jenis	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	4 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000	500.000	0
2	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	15 Kegiatan Usaha	Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	500.000	500.000	0
2	18	02	2,02	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	39%	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	39%	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	100.000.000	0
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Peta Data Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	100.000.000	0
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	70%	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	70%	DPM PTSP	DPM PTSP	254.000.000	254.000.000	(50.000.000)
2	18	03	2,01	03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	DPM PTSP	DPM PTSP	254.000.000	254.000.000	(50.000.000)
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	4 Dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	254.000.000	254.000.000	(50.000.000)
18		04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diberikan Dalam Satu Tahun	3747	Jumlah Perizinan yang Diberikan Dalam Satu Tahun	3747	DPM PTSP	DPM PTSP	888.000.000	888.000.000	0
2	18	04	2,01	04	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2500 Izin	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2500 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	888.000.000	888.000.000	0



**RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2500 Pelaku Usaha	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	2500 Pelaku Usaha	DPM PTSP	767.000.000	767.000.000	0
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	Jumlah pelayanan izin pranjang usaha yang diterbitkan	20 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	129.000.000	129.000.000	0
2	18	04	2.01	03	Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan keterkolnya perguduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	720 Orang	Konsultasi Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	720 Orang	DPM PTSP	0	0	0
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaannya yang Berinvestasi	68.03%	Prosentase Pengendalian Perusahaannya yang Berinvestasi	68.03%	DPM PTSP	406.600.000	406.600.000	0
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	DPM PTSP	406.600.000	406.600.000	0
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	Jumlah Perusahaan Yang Terpadu Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	0	0	0
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	75 Pelaku Usaha	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 Pelaku Usaha	DPM PTSP	166.600.000	166.600.000	0
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	75 Kegiatan Usaha	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	75 Kegiatan Usaha	DPM PTSP	240.000.000	240.000.000	0
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	0	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	0	DPM PTSP	75.000.000	75.000.000	(75.000.000)



## RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	0	(75.000.000)
2	18	06	2.01	01 Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	-	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	0	(75.000.000)

Lamongan, Desember 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN

**JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680114 198801 1 001



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Baplitbangda Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

*Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),*



sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

## **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lamongan,            Desember 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAOMONGAN



**JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H**

Pembina Tk. I

NIP. 19680114 198801 1 001